

Eksistensi Al-Azhar Mesir dan Peran Mahmūd Syaltūt Sebagai Lokomotif Pembaharu

Abrar¹, Andi Takdir², Firdaus³

STAI Al-Furqan Makassar, Indonesia

✉ abror.bahari@gmail.com

Abstract

Tujuan Penelitian ini Untuk mengkaji hubungan antara Al-Azhar dengan rezim khususnya rezim as-Sisi yang berkuasa saat ini. Perbedaan nalar politik antara ulama Al-Azhar dengan organisasi Ikhwanul Muslimin (IM) dalam merespon kudeta militer tahun 2013 juga diulas dalam artikel. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*) dengan referensi dari buku, jurnal, sumber-sumber otoritatif dari internet dan analisis sejarah Al-Azhar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Azhar mengalami transformasi dari faham Syiah Ismailiyah oleh dinasti Fatimiyah menjadi faham Sunni oleh dinasti Ayyubiyah. Syaikh Mahmūd Syaltūt adalah *game changer* dalam gerakan rekonsiliasi, dan moderisasi Al-Azhar. Di antara kebijakan strategisnya adalah membangun lembaga *Majma' al-Buhūts al-Islāmiyah* sebagai pusat riset intelektual Al-Azhar. Hubungan antara ulama Al-Azhar dan penguasa di Mesir mengalami pasang surut. Keberadaan Al-Azhar di Mesir sangat krusial untuk melanggengkan kekuasaan karena dijadikan sebagai simbol bagi penguatan ideologi penguasa. Tetapi di sisi lain, pengaruh Al-Azhar yang begitu besar dengan nalar kritis para ulamanya menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi rezim; karena dianggap dapat mengganggu stabilitas negara.

Kata Kunci: Al-Azhar, Modernisasi, Mahmūd Syaltūt

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Dalam sejarah Islam, ulama memiliki posisi yang penting dalam eksisnya sebuah negara. Ulama sebagai satu-satunya yang diyakini mampu menafsirkan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukumnya menjadikan posisinya sangat prestisius. Ulama bukanlah sebuah jabatan tertentu yang diangkat secara resmi namun, jabatan yang disematkan atasnya atas capaian keilmuan yang didupakannya. Dalam negara Islam masa lalu, ulama menjadi *balance of power* penyeimbang kekuasaan pemerintah. Keberadaan ulama dalam negara menjadi pengontrol penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Penguasa dalam negara Islam wajib untuk menjalankan aturan Islam dalam setiap kebijakannya (*tasharruf al-imām manūthun bi al-mashlahah*). Ulama menjamin supaya penguasa tetap berada di jalan tersebut. Ulama memang tidak

memiliki power untuk menjatuhkan penguasa jika penguasa melenceng dari ajaran Islam. Namun posisi ulama sebagai *role model* bagi masyarakat dan simbol pengikat bagi masyarakat (*cultural broker*) menjadikan ulama mampu mengubah rezim yang berkuasa dengan cara mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap penguasa melalui fatwa dan ajaran-ajarannya (Noah Fielman, 2001).

Fungsi ulama disini menurut Hatina adalah pengendali opini publik dan perwakilan informal bagi masyarakat. Selain fungsi kontroling terhadap kebijakan penguasa ulama juga memiliki kemampuan sebagai stabilisator dan kekuatan penengah dalam masyarakat termasuk antara penguasa dan rakyat (Meir Hatina, 2010).

Di Mesir misalnya, peran ulama khususnya ulama Al-Azhar dalam skala regional telah memberikan peranan penting bagi kemajuan peradaban Islam di Mesir itu sendiri. Al-Azhar dalam lintasan sejarahnya telah memberikan kontribusi besar pada negara. Lembaga ini merupakan produsen ulama yang sangat tangguh. Menjadikan Mesir sebagai *center of excellence* dunia Islam. Universitas Islam terbesar ini juga terlibat dalam mengusir penjajah, saat perang salib dan mamalik. Dan tidak berhenti disitu saja, ketika Prancis datang menjajah Mesir, universitas ini tetap ikut dalam pengusiran negara agresor tersebut. Para ulama Al-Azhar memimpin rakyat dalam revolusi Kairo pertama, pada tahun 1798. Lalu, dilanjutkan dengan revolusi Kairo kedua pada 1800, setelah Prancis meninggalkan Mesir. Revolusi itu pun berakhir pada 1805, ditandai dengan naiknya Muhammad Ali di tampuk kepemimpinan Mesir. Begitu juga revolusi yang dimotori oleh mahasiswa Al-Azhar ketika melawan agresi Inggris pada 1919 M. Revolusi itu dipimpin oleh Sa'ad Jaglul. Ia salah seorang mahasiswa yang pernah mengenyam pendidikan di sana. Pada tahun 1956 M. Gamal Abdul Nasir di atas mimbar masjid Institusi Al-Azhar memproklamasikan tiga musuh besar (*big enemy*) yang harus ditumpas yaitu: Inggris, Prancis, dan Israel.

Dalam perkembangannya, Al-Azhar sebagai salah satu universitas tertua di dunia mengalami perubahan signifikan. Dahulu puncak kedudukan tertinggi, Grand Syaikh, dipilih oleh ulama-ulama Al-Azhar itu sendiri. Jabatan itu diemban seumur hidup. Yang menduduki jabatan itu harus benar-benar kapabel, karena maju mundurnya Al-Azhar ke depan dan sejauh mana peran Al-Azhar kemajuan bagi peradaban umat di belantara dunia sangat ditentukan oleh kepiawaian Grand Syaikh. Tetapi, setelah Al-Azhar tidak lagi sebagai sebuah universitas yang independen, maka keberadaannya pun di bawah naungan pemerintah Mesir. Penentuan Grand Syaikh dan rektor pun tidak lagi ditentukan oleh ulama-ulama Al-Azhar, tetapi dengan Keputusan presiden (Keppres).

Menarik untuk mencermati romantika dan dinamika yang terjadi di Al-Azhar Mesir, khususnya peran ulama dalam gerakan pembaharuan dan modernisasi di tubuh Al-Azhar dan Mesir pada umumnya. Dalam tulisan ini penulis akan fokus memaparkan mengenai sejarah lahirnya Al-Azhar. Al-Azhar dari masa kemasa, dan hubungannya dengan dinasti fathimiyah di Mesir. Tulisan ini akan mengangkat sosok ulama yang juga merupakan Grand Syaikh Al-Azhar yang sangat fenomenal

sebagai figur bintang dan lokomotif pembaharuan dan kemajuan Al-Azhar yaitu Imam al-Akbar Dr. Mahmūd Syaltūt . Tulisan ini juga akan mengkaji bagaimana kondisi hubungan antara Al-Azhar sebagai otoritas agama Islam sunni tertinggi dengan rezim khususnya rezim As-Sisi yang berkuasa sekarang. Artikel ini juga mengulas perbedaan afiliasi dan pandangan politik antara ulama Al-Azhar dengan organisasi Islam terbesar di Mesir yaitu Ikhwanul Muslimin dalam merespon kudeta militer tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber pepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penguraian secara teratur data yang diperoleh kemudian diberikan penjelasan kepada agar bisa dipahami oleh pembaca. Pengumpulan datanya dengan membaca refrensi-refrensi berupa buku-buku, artikel-artikel dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan dibahas pada penelitian. Pengumpulan data berbasis dokumen (*document-based methods*) dan internet (*internet-based methods*), keduanya digunakan untuk mengumpulkan data dalam artikel (Bakry, 2019). Baik dokumen dan internet, keduanya diklasifikasikan kembali sebagai sumber primer (langsung dan utama) dan sumber sekunder (sudah diolah pihak lain). Subjek dan Objek Penelitian Subyek dalam artikel ini adalah Universitas Al-Azhar sebagai aktor utama. Sedangkan obyek yang diteliti adalah eksistensi Al-Azhar dengan Gerakan moderatisasi yang dipelopori oleh Syaikh Mahmud Syaltut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Al-Azhar Mesir dari Masa ke Masa

Dalam sejarah dunia keilmuan, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dikenal sebagai lembaga pendidikan tinggi tertua di dunia. Hadirnya Al-Azhar merupakan bukti bahwa peradaban Islam sesungguhnya lebih maju bila dibandingkan dengan bangsa Barat. Sebab, Barat baru membangun lembaga pendidikan tinggi sekitar dua abad pasca berdirinya Al-Azhar.

Sejarah berdirinya Al-Azhar memang tidak dapat dilepaskan dari peranan dinasti atau kekhalifahan Fatimiyah. Mereka yang mula-mula membangun dan memfungsikan masjid Al-Azhar sebagai sarana atau wadah untuk dunia pendidikan. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu imperium besar dalam sejarah Islam (Ajid Thohir, 2009).

Pada awalnya, Fatimiyah merupakan dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan atau daulat Abbasiyah. Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang dipimpin oleh 14 khilafah atau imam di Afrika Utara (909 M-1171 M). Dinasti ini dibangun berdasarkan konsep Syiah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah (putri Nabi Muhammad Saw). Kata "Fatimiyah" dinisbatkan kepada Fatimah karena pengikutnya mengambil silsilah keturunan dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah saw (Ajid Thohir, 2009).

"Az-Zahra" sendiri merupakan rujukan kata yang digunakan Dinasti Fatimiyah untuk menamakan masjid yang mereka dirikan, yakni Al-Azhar pada sekitar 970-

972 Masehi. Awalnya masjid tersebut bernama al-Qāhira lalu diubah namanya menjadi Al-Azhār. Nama Al-Azhar berasal dari julukan Fatimah al-Zahra, putri dari Nabi Muhammad Saw dan istri dari Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, Jāmi' al-Qāhirah lebih dikenal dan diketahui dengan nama Al-Azhar.

Lahirnya Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan dimulai pada saat dinasti Fatimiyah berada di puncak kejayaannya. Saat itu, dinasti Fatimiyah dipimpin oleh Abū al-Manshūr Nizar al-'Azīz pada tahun 975 M – 996 M. Belakangan, masjid tersebut akhirnya difungsikan sebagai lembaga atau pusat pendidikan Islam kala itu. Ia adalah khalifah Fatimiyah yang kelima dan khalifah pertama yang memulai pemerintahan di wilayah Mesir. Al-Aziz berhasil menempatkan dinasti Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur. Bahkan, menenggelamkan pamor dari penguasa Abbasiyah kala itu (Jamal Syauqi, 1988).

Kemajuan peradaban pada dinasti Fatimiyah dapat dilihat dari beberapa aspek atau bidang. Pertama, dalam aspek sosial, baik al-Aziz maupun Khalifah Fatimiyah yang lain selalu bersikap toleran kepada para penduduk atau warga non-Muslim. Bahkan, ada beberapa di antara mereka yang diangkat sebagai pejabat keuangan negara.

Dalam bidang ekonomi, menurut M.Abdul Karim dalam bukunya *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* yang dikutip Abdul Gaffar menjelaskan, untuk meningkatkan dan menopang kegiatan perekonomian, dinasti Fatimiyah membangun beberapa infrastruktur. Antara lain, membangun jalur terusan dan jembatan sebagai jalur perlintasan atau pendistribusian hasil pertanian (Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/oibo2w313/sejarah-lahirnya-alazhar>).

Dalam bidang arsitektur, dinasti Fatimiyah adalah pelopor didirikannya Masjid Al-Azhar di Kairo. Pada masa kekhalifahan al-Aziz, masjid tersebut juga difungsikan sebagai pusat pendidikan kala itu. Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi corong dan alat untuk propaganda kekuasaan kekhalifahan, sekaligus sebagai alat penyebaran doktrin ajaran Syi'ah.¹

Pada masa itu, sistem pengajaran terbagi menjadi empat kelas, yaitu: *Pertama*, kelas umum diperuntukkan bagi orang yang datang ke Al-Azhar untuk mempelajari al-Qur'an dan penafsirannya; *Kedua*, kelas para mahasiswa Universitas Al-Azhar kuliah dengan para dosen yang ditandai dengan mengajukan pertanyaan dan mengkaji jawabannya; *Ketiga*, kelas Darul Hikam, kuliah formal ini diberikan oleh para mubaligh seminggu sekali pada hari Senin yang dibuka untuk umum dan pada hari Kamis dibuka khusus untuk mahasiswa pilihan. *Keempat*, kelas nonformal, yaitu kelas untuk pelajar wanita (Aidil Saputra, 2020).

Pada awal berdirinya, semua pihak yang ingin menimba ilmu di Al-Azhar dilarang mempelajari mazhab lain kecuali Syiah. Pada masa itu dinasti Fatimiyah memang menjadikan Al-Azhar sebagai media penyebaran ajaran atau paham Syiah. Setelah dinasti Fatimiyah ditumbangkan oleh Shalāhuddin al-Ayyūbi pada 576 Hijriyah atau 1171 Masehi, kegiatan belajar mengajar di Al-Azhar sempat dihentikan. Kala itu, Shalāhuddin juga berinisiatif untuk memutus penyebaran Syiah di Mesir yang telah berkembang sekian lama. Pada 665 Hijriyah, tepatnya pada masa dinasti Mamalik (Mamluk), Al-Azhar kembali difungsikan sebagai lembaga pendidikan. Ketika itu, aliran keislaman yang dipelajari Al-Azhar telah diubah menjadi aliran Sunni. (Elfranto, 2020).

Kemudian, dalam perjalanannya, Al-Azhar tidak hanya fokus dalam pengajaran ilmu-ilmu keislaman, tapi juga merambah ilmu pengetahuan umum, seperti ekonomi, psikologi, kedokteran, matematika, teknik, dan lainnya.

Pada masa perkembangannya, Universitas Al-Azhar tidak hanya memiliki pembelajaran yang sebatas pada ilmu agama, tetapi juga bercabang pada diskusi dan perdebatan bebas antar ilmuwan. Maka dari itu, Al-Azhar mulai mendapatkan karakteristik universitas akademik dengan pembelajaran yang beragam. Pada masa keemasannya di abad ke 14 dan ke 15, Universitas Al-Azhar mulai memberikan ilmu seperti ilmu kedokteran, matematika, astronomi, geografi, dan sejarah. Meskipun begitu, teologi dan hukum tetap menjadi studi dan penelitian utama yang difokuskan dan menjadi kajian oleh para scholer. (Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/oibo2w313/sejarah-lahirnya-alazhar>)

B. Universitas Al-Azhar di Era Modern

Ketika dimulainya masa pendudukan Eropa, peran Al-Azhar juga berubah, seperti [masa kolonial Eropa di Indonesia](#). Pada masa pemerintahan Prancis, Al-Azhar digunakan sebagai locus perlawanan untuk menghadapi tentara Prancis. Ketika tahun 1811, kebangkitan kekuasaan Muhammad Ali memiliki kebijakan kontrol negara terpusat. Maka dari itu, Al-Azhar juga terpaksa menerima perubahan pada otonomi tradisionalnya, termasuk perubahan internal dalam organisasi dan peraturannya menjadi lebih moderat.

Semakin hari, Al Azhar berkembang semakin besar. Sehingga tidak hanya berpusat di ibukota, Kairo, tapi hampir menyeluruh di setiap provinsi di Mesir dibuka cabang Al-Azhar. Dibentuklah dalam tubuh Al-Azhar beberapa jenjang pendidikan, sejak tingkat dasar sampai jenjang S3. Sebagai universitas modern, Al-Azhar turut membuka model kuliah yang diklasifikasikan dalam dua kelompok fakultas: 'Ilmi (Sains) dan Adaby (agama). Meskipun ada pengelompokan fakultas, namun bukan maksud Al-Azhar untuk memisahkan studi bidang umum dan agama, tapi lebih sebagai upaya menuju spesialisasi bidang studi bagi para mahasiswanya.

Al-Azhar juga menyediakan fakultas khusus putri (*Kulliyatul Banāt*) yang terpisah dari mahasiswa putra (*banīn*). Kebesaran tersebut lebih terasa lagi, demi mengetahui bahwa Al-Azhar adalah lembaga sosial yang teramat sosial. Saat ini Al-Azhar mempunyai 41 fakultas. 19 fakultas berada di Kairo, dan selebihnya tersebar di berbagai provinsi. Saat ini Universitas Al-Azhar merupakan salah satu universitas tertua di dunia yang telah banyak mengeluarkan ulama ternama, diantaranya Muhammad 'Abduh, Jamaluddīn al-Afghāni, Yusuf al-Qardhāwi, begitu juga dengan pakar tafsir Indonesia M. Quraish Shihab. Usia seribu delapan puluh satu tahun tentu saja banyak mengalami dinamika dan romantika. Walau uzur dalam usia, namun Al-Azhar tetap menjadi favorit dan masih menjadi kiblat ilmu-ilmu Islam saat ini. Hal itu dapat dilihat dari antusiasme para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia berdatangan ke Kairo. Untuk wilayah Timur Tengah, rating tertinggi pelajar tanah air masih didominasi Mesir dengan Universitas Al-Azharnya.

Pimpinan tertinggi Al-Azhar digelar Imam Besar Al-Azhar (*Al-Imām al-Akbar*), juga dikenal sebagai Grand Syaikh Al-Azhar atau Syaikh Besar Al-Azhar (*Syaikh Al-Azhar asy-Syarīf*). Tugas Imam Besar adalah mengawasi Masjid Al-Azhar, ekstensi [Universitas Al-Azhar](#) dan bertanggung jawab atas urusan agama resmi selain Mufti Besar Mesir. *Syaikhul al-Azhār* pertama di pegang oleh Syaikh Muhammad al-Kharāsyi, yang menjabat dari tahun 1679-1690 dari mazhab Maliki.

Saat ini, [Mahmūd el-Tayeb](#) menjabat sebagai Imam Besar Al-Azhar. Berikut Daftar Grand Syaikh Al-Azhar terkini terhitung sejak tahun 1954-sekarang:

Imam Besar Al-Azhar	Mulai	Selesai	Mazhab
'Abdurrahmān Taj	1954	1958	Hanafi
Mahmūd Syaltūt	1958	1963	Hanafi
Hasan Ma'mūn	1963	1969	
Muhammad al-Fahhām	1969	1973	
'Abdul Halīm Mahmūd	1973	1978	
Muhammad 'Abdurrahman Bishar	1979	1982	
Jād al-Haq 'Ali Jād al-Haq	1982	1996	
Muhammad Sayyid Thanthāwy	1996	2010	Syafi'i
Mahmūd ath-Thayyib	2010	Petahana	Maliki

C. Moderatisme Al-Azhar dan Peran Mahmūd Syaltūt Sebagai Lokomotif Pembaharu

Akibat dari berbagai hal yang membuat Mesir mengalami pergeseran kekuasaan yang berdampak pada kemunduran umat, maka dibutuhkan adanya perubahan signifikan pada masyarakat. Dapat digambarkan bahwa tokoh pembaru kala itu menginginkan sebuah kebangkitan di kalangan umat Islam terutama di Al-Azhar dan Mesir karena telah lama mengalami kebekuan dan kemunduran dibanding Eropa dan Barat. Umat Islam harus bangkit kembali dan itu dimulai dari pengelolaan sistem pendidikan di Al-Azhar Mesir.

Kontak kebudayaan antara Mesir dan kebudayaan yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte menimbulkan kesadaran umat Islam bahwa mereka telah tertinggal jauh dari Eropa. Kebangkitan Islam merupakan upaya aktif untuk membangun keseluruhan tatanan sosial sesuai dengan visi ideologis yang diilhami secara kanonik mengenai realitas. Dengan kata lain, menurut Kuntowijoyo, kebangkitan Islam bukan hanya sekedar reaksi lain terhadap modernisasi, akan tetapi ia merupakan upaya untuk penegasan diri dan aktualisasi terhadap suatu keyakinan universal di dunia temporal (Kuntowidjoyo, 1991).

Secara sosial historis, karakteristik kebangkitan peradaban yang dilakukan oleh para tokoh pembaru di Al-Azhar bagi penguatan dan kemajuan Mesir sebagai sebuah negara mengarah pada tiga hal, yaitu proses mengeluarkan umat Islam dari fatalisme dan fanatisme, ideologi dan aksi, dan ideologi ilmu pengetahuan dan aplikasi (Badri Yatim, 1995).

Gerakan fatalisme dan fanatisme adalah mengeluarkan umat Islam dari sikap jumud dan fanatik mazhab kepada sikap ijtihad dan berpikir rasional. Gerakan ideologi dan aksi adalah adanya usaha dan keinginan untuk melawan penjajah dengan melakukan aksi dan perlawanan sehingga umat Islam dapat berdiri sendiri untuk maju. ilmu pengetahuan dan aplikasi adalah adanya pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh masyarakat Islam yang diaplikasikan melalui

lembaga pendidikan.

Setelah mengalami masa kebekuan pemikiran di Al-Azhar Mesir, para pemikir Islam berusaha keras untuk membangkitkan Islam kembali, termasuk di dalamnya gagasan pendidikan. Kebangkitan kembali ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid dan jumud, yang ditengarai akibat dari mundurnya aktivitas ijtihad bahkan pintu ijtihad telah tertutup (*insidād bāb al-ijtihād*), membawa kemunduran dunia Islam secara keseluruhan. Maka kemudian muncullah gerakan-gerakan baru yang memelopori perubahan mendesak di kalangan umat Islam, sebagai wujud kesadaran dari kebangkitan kembali pendidikan Islam.

Para tokoh pembaharu berusaha mengeluarkan umat Islam dari sikap fatalisme yang ketiga hal ini menyatu dalam usaha para tokoh pembaru di Al-Azhar Mesir. Ada banyak nama-nama Ulama Mesir yang menjadi pioner dan tokoh-tokoh pembaharuan di Mesir sebutlah misalnya Muh. 'Ali Pasya, Rifa'ah al-Tahtāwi, Muhammad 'Abduh, Jamāluddīn al-Afghāni, Rasyid Ridha dan masih banyak lagi yang lain, tetapi untuk pembaharuan secara khusus di lembaga Al-Azhar yang paling fenomenal adalah sosok Syaikh Dr. Mahmūd Syaltūt yang juga merupakan Grand Syaikh Al-Azhar pada tahun 1958 M.

Mahmūd Syaltūt *Syaikhul Azhar* yang pertama kali disematkan gelar Imam Akbar. Ulama Al-Azhar ini lahir di Markaz *Etay al-Barūd* Provinsi Buhaira pada 23 April 1893 M. Wafat 12 Februari 1963. Ia mengawali pendidikannya dengan menghafal al-Qur'an, memasuki Ma'had Alexandria, kemudian menduduki bangku kuliah di perguruan tinggi Al-Azhar hingga memperoleh gelar sarjana pada tahun 1918 M. Setahun setelah sarjana, tahun 1919 ia diangkat menjadi pengajar di Ma'had Alexandria, sekaligus aktif terlibat dalam aksi revolusi 1919 melawan kolonialisme Inggris melalui ketajaman pena dan orasinya yang sangat berani (Muhammad Syafiq Gharbal, 1965).

Melihat kecakapan dan kecerdasannya, Syaikh Musthafa Al-Marāghi selaku Grand Syaikh kala itu memutasi tugasnya sebagai dosen di perguruan tinggi. Namun akibat kekritisannya melemparkan pandangannya dalam gerak *Ishlāh Al-Azhar*, ia dicopot dari tugas sebagai pengajar, sehingga sempat beralih profesi sebagai pengacara sampai dia ditarik kembali tahun 1935 M. Setelah kembali ke pelukan Al-Azhar, karirnya terus meningkat cemerlang, menduduki jabatan wakil dekan Fakultas Syari'ah, lalu terdaftar sebagai anggota Dewan Senior Ulama Al-Azhar, anggota *Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah* tahun 1946 M, dan puncaknya menjadi Grand Syaikh Al-Azhar pada tahun 1958 M.

Sebelum didapuk menjadi Grand Syaikh, Syaikh Syaltūt sudah pernah ditawarkan jabatan wakil Al-Azhar dua kali. Yang pertama pada tahun 1950, tetapi dia menolak tawaran itu, sebab Raja Faruq mensyaratkan ia harus berhenti menjadi khatib dan pengajar di Masjid Amīr Mahmūd 'Ali Shagīr di Manial. Barulah pada tawaran kedua tahun 1957 dia resmi menjabat orang nomor dua di Al-Azhar, kemudian setahun setelahnya dia resmi menjadi orang nomor satu Al-Azhar sebagai Grand Syaikh.

Syekh Mahmūd Syaltūt produktif menelurkan karya-karya penting yang berbicara tentang diskursus-diskursus penting masa kontemporer, upaya meluruskan pemahaman yang keliru dan pandangan yang sempit dalam beragama. Misalnya pandangan al-Qur'an tentang perang, pandangan Islam tentang emansipasi, hubungan antar negara dan wacana-wacana keislaman lainnya. Karya-karyanya telah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ia pernah mempresentasikan makalah yang memukau pada konferensi Den Haag dengan

judul *Al-Mas'ūliyah al-Madaniyah wa al-Jināiyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah* yang membuat para peserta konferensi menerima usulan untuk menjadikan Syari'at Islam sebagai salah satu dasar pembukuan konstitusi hukum dunia. Di antara karyanya adalah: *Fiqh al-Qurān wa al-Sunnah, Muqāranatu al-Madzāhib, Al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah, Tafsīr al-Qurān al-Karīm* (10 Juz Pertama), *Tanzhīm al-'Alāqāt al-Dauliyah al-Islāmiyah, Al-Islām wa al-Wujūd al-Dauliy li al-Muslimīn, Wa Yas-alūnak* (kumpulan fatwa), *Al-Qurān wa al-Qitāl, Al-Qur'ān wa al-Mar'ah* (Muhammad Syafiq Gharbal, 1965).

Mahmūd Syaltūt merupakan salah seorang cendekiawan Muslim yang memiliki keteguhan batin yang mendalam dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam, sekaligus mempunyai keberanian dalam menghadapi tantangan dan resiko yang menghadangnya. Ia dibesarkan dalam tradisi keilmuan yang relatif mapan di pusat studi Islam di Timur Tengah (Mesir).

Pemahaman keagamaannya yang mendalam dan komprehensif menjadikan dirinya dapat dengan mudah menjelaskan ajaran Islam sebagai sesuatu yang aktual dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Selama ini, kaum muslimin di Mesir dan di dunia Islam pada umumnya, telah menaruh suatu keyakinan bahwa pintu ijtihad dalam hukum Islam sudah tertutup dengan keberadaan mazhab-mazhab hukum yang menjadi panutan umat Islam dalam kehidupan masyarakat mereka. Mereka harus tunduk dan mengikuti salah satu mazhab yang telah ada. Kondisi yang demikian dipandang oleh Syaltut sebagai hal yang berbahaya dan riskan bagi umat Islam se-dunia. Kebekuan berpikir yang demikian harus diperbaiki, karena cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir yang jumud (*rigid*) dan kaku serta dapat mematikan kreativitas dan dinamika pemikiran hukum Islam. Dengan demikian berarti, hukum Islam sudah berhenti perkembangannya dan tidak boleh lagi berkembang dan dikembangkan, padahal hukum Islam itu luas dan luwes -meminjam istilah Yusuf al-Qardhāwi- untuk diaktualisasikan dalam berbagai spektrum kehidupan manusia.

Menurut Ahmad Syaltūt merupakan suatu kekeliruan besar yang harus diperbaiki dengan segera, untuk mengembalikan pemahaman Islam yang keliru kepada yang lurus, dan menghidupkan kembali elan vital pemikiran hukum Islam yang luas, fleksibel, dan elastis. Dalam konteks itu, Syaltūt berpendirian bahwa Islam merupakan agama rasional yang senantiasa memberikan kemerdekaan berijtihad, menggali hukum-hukum dan pengetahuan Islam dan sumbernya yang asli, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, dengan melepaskan diri dari kekakuan dan kebekuan, dari pendapat-pendapat lama yang telah usang dan memerlukan tinjauan baru, sesuai dengan tuntutan zaman, kondisi, situasi serta tempat yang mengitarinya. Perintah membaca (QS. al-'Alaq: 1-2), dan perintah berpikir dalam banyak ayat al-Qur'an, seperti (QS. Al-Ghasiyah: 17-20; Ali 'Imran:190-191), dan penegasan Nabi Saw. bahwa agama itu akal, merupakan basis keagamaan (Islam) yang memberikan ruang-gerak pemikiran Islam secara luas dan penuh kemerdekaan.

Dengan pendirian seperti itu, Syaltūt berusaha menyikapi dan merespon berbagai tantangan zaman, sebagai jawaban atas reformasi dan pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dicanangkannya. Hal itu akan tampak jelas nanti dalam gerakan sang imam dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap hukum yang berkembang di masanya di Mesir, sebagaimana yang dibukukannya dalam *al-Fatāwa* (Kumpulan Fatwa-fatwa) dan percepatan pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilancarkannya pada Universitas Al-Azhar yang

dipimpinnya dalam merubah tata cara dan penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di dalamnya, serta berbagai aturan yang menghambat kemajuan Al-Azhar itu sendiri.

Ahmad Syaltūt bahkan pernah dikeluarkan dari Al-Azhar, karena alasan politis. Dalam arti, pemikiran dan aksi reformasinya dipandang dapat membahayakan stabilitas negara, mengingat Al-Azhar pada masa itu mempunyai posisi tawar yang tinggi terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah. Akan tetapi, dengan alasan lain yang lebih bersifat akademis, ia kemudian diterima dan diangkat kembali sebagai dosen Al-Azhar. Perjuangannya cukup panjang dan berat dalam menjawab tantangan reformasi, akan tetapi dengan ketabahan dan kekuatannya, reformasi dalam bidang hukum dan pendidikan yang dilancarkannya memberikan hasil yang gemilang dan bahkan ia diangkat sebagai orang pertama, sebagai rektor Al-Azhar. Jabatan itu diemban sampai akhir hayatnya tahun 1969.

Di antara kebijakan strategisnya juga adalah menginstruksikan penggalakan kursus bahasa asing di Al-Azhar dan mendelegasikan pelajar yang cakap berbahasa asing sebagai duta-duta Al-Azhar ke berbagai negara, terutama negara-negara Barat. Membangun *Majma' al-Buhūts al-Islāmiyah* sebagai pusat riset kaum intelektual Al-Azhar yang hingga kini gencar membincangkan isu-isu krusial di dunia Islam. Di eranya pulalah untuk pertama kalinya Al-Azhar membuka kampus putri untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum wanita mengecap pendidikan tinggi (Sumber: <http://www.ntbmesir.net/2019/01/siapa-syekh-mahmud-syaltut.html>).

Karena perjalanan ilmiah dan jasa-jasanya itulah hingga dianggap sebagai tokoh terpenting di antara Grand Syaikh Al-Azhar dalam gerakan rekonsiliasi, menyerukan pembaharuan, menolak kejumudan dan *taqlid* sehingga tidak hanya mendapatkan tempat di hati kalangan muslimin, tapi juga dicintai kalangan non-muslim.

Syekh Mahmūd Syaltūt dikenang karena upayanya menggandeng mazhab-mazhab dalam tubuh Islam, terutama antara Sunni dan Syi'ah. Di antara fatwanya adalah kebolehan beribadah dengan memilih mazhab manapun dari mazhab-mazhab Islami yang diakui landasan-landasannya melalui dalil-dalil naqli yang sah, termasuk madzhab Syi'ah Imamiyah. Walaupun fatwa ini disangkal pernah muncul dari beliau oleh muridnya Syekh Yusuf Al-Qardhāwi, tetapi Syaikh Muhammad Al-Ghazāli mengamini fatwa tersebut dan menyebutnya sebagai langkah strategis untuk mempersatukan umat Islam.

D. Dinamika Hubungan antara Ulama Al-Azhar dan Pemerintah Mesir

Hubungan antara Ulama Al-Azhar dan Penguasa Mesir mengalami pasang surut, kadang mesra dan sangat cair tetapi di lain waktu diwarnai oleh intrik-intrik dan ketegangan, dan dengan nuansa yang berbeda untuk setiap rezim yang berkuasa. Hal itu disebabkan karena disatu sisi Keberadaan Al-Azhar di Mesir bagi penguasa saat itu, sangat krusial untuk melanggengkan kekuasaannya karena dijadikan sebagai simbol bagi penguatan ideologi penguasa. Keberadaan Al-Azhar menjadi pusat perebutan kekuasaan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi masing-masing penguasa dalam rangka mensukseskan kepemimpinan. Tetapi, pengaruh Al-Azhar yang begitu besar dengan nalar kritis para ulamanya terkadang menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi rezim tertentu karena dianggap dapat mengganggu stabilitas negara.

Sadar akan peran yang begitu besar dan pengaruh Al-Azhar yang sangat luas,

para penguasa Mesir modern kemudian melakukan segala macam cara untuk melemahkan Al-Azhar. Sejak masa Muhammad Ali Pasha, usaha tersebut sudah mulai dilancarkan. Saat itu Muhammad Ali dengan begitu gencar mendirikan institusi-institusi pendidikan dan keilmuan sebagai tandingan bagi Al-Azhar. Ia pun berusaha keras untuk melepaskan pengaruh Al-Azhar di Mesir. Kepemimpinan Muhammad Ali Pasha di Mesir pada tahap selanjutnya telah membentuk sistem pendidikan yang paralel tapi terpisah. Sikap dan kebijakan serupa terus dilakukan oleh para pemimpin Mesir berikutnya. Mereka berusaha menghalangi Al-Azhar untuk mengambil peran dalam ranah politik. Pada saat yang sama, mereka mempergunakan Islam dan para ulamanya untuk mewujudkan tujuan politiknya (Elfrianto, 2014).

Demikian juga ketika rezim Muhammad Naguib dan juga Gamāl 'Abdul Naser ikut melemahkan Al-Azhar. Bermula pada akhir tahun 1952, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 180 tentang penghapusan wakaf swasta. Sebagai konsekuensinya, maka tanah-tanah wakaf yang menjadi sumber ekonomi utama Al-Azhar dikuasai negara dan diserahkan kepada Departemen Perbaikan Pertanian. Pemerintah Mesir juga menghapus pengadilan-pengadilan syariah di Mesir, sehingga peran Al-Azhar dalam praktik kehidupan rakyat Mesir semakin terbatas.

Ketegangan antara Al-Azhar sebagai otoritas agama Islam Sunni tertinggi, dan pemerintah Presiden Mesir 'Abdel Fattah al-Sisi telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal itu terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat Mesir menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur kegiatan Dār al-Ifta, lembaga yang berafiliasi dengan Al-Azhar yang bertanggung jawab mengeluarkan fatwa agama. RUU tersebut telah diajukan kepada Dewan Negara untuk ditinjau sebelum pengesahan terakhirnya oleh parlemen. Mereka berupaya mengatur kembali Dār al-Ifta beroperasi termasuk mekanisme pemilihan pemimpin yakni grand mufti, mandatnya dan lama masa jabatannya. Jika RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, Dewan Sarjana Senior Al-Azhar (CSS) tidak akan lagi memilih mufti melalui pemungutan suara secara rahasia, metode pemungutan suara yang diperkenalkan oleh mendiang Presiden Mohammed Morsi pada 2012. Nantinya, RUU tersebut menetapkan CSS, yang terdiri dari 40 cendekiawan terkemuka Al-Azhar, akan mencalonkan tiga ulama baik dari anggota sendiri atau dari luar dewan untuk posisi itu dan itu akan sampai ke tingkat presiden untuk memilih dari ketiganya diangkat sebagai mufti. Ini berarti Dār al-Ifta tidak lagi berfungsi sebagai badan penasihat dan peradilan Al-Azhar, tetapi akan berfungsi sebagai entitas yang terpisah.

Selain itu, nantinya RUU menetapkan kerangka hukum dan peraturan untuk pemilihan dan penunjukan ulama fatwa dalam mendefinisikan metodologi dan menetapkan pembentukan komite ahli hukum. Dalam sebuah surat yang dikirim ke Ketua parlemen 'Ali 'Abdel Aal sebelum sidang parlemen 18 Juli di mana rancangan undang-undang tersebut disahkan, Al-Azhar mengecamnya sebagai tidak konstitusional dan upaya merusak kebebasan Al-Azhar. Al-Azhar menyarankan beberapa ketentuan undang-undang yang diusulkan diubah agar sejalan dengan pasal-pasal dalam konstitusi yang menyatakan badan keagamaan Islam apa pun adalah bagian integral dari Al-Azhar dan bahwa yang terakhir harus mengawasi pekerjaan semua lembaga keagamaan. Al-Azhar juga menyebut rancangan undang-undang suatu pelanggaran pada kekuatan dan independensi CSS (Sumber: <https://republika.co.id/berita/qe079w366/Al-Azhar-mesir-bentrok-dengan-pemerintah-soal-otoritas-fatwa>).

Sebenarnya ketegangan telah sering terjadi antara Al-Azhar dan pemerintah.

Keretakan antara Al-Azhar dan otoritas legislatif dan eksekutif melebar pada akhir 2018 setelah parlemen membahas rancangan undang-undang yang mengatur fatwa di media. Di bawah undang-undang yang diusulkan, hanya ahli hukum dari Dār al-Ifta, Kementerian Agama dan Wakaf, CSS dan Pusat Penelitian Al-Azhar yang dapat memberikan pendapat hukum tentang hal-hal yang menyangkut Syariah. Selain itu, mengeluarkan fatwa melalui saluran siaran akan memerlukan izin dari otoritas terkait. Al-Azhar menentang kementerian yang memiliki peran dalam penerbitan fatwa, melihat ini sebagai perambahan pada tugasnya.

Awal tahun ini, sebuah fatwa yang disengketakan oleh seorang ulama Al-Azhar yang menyatakan Muslim dilarang menawarkan zakat kepada non-Muslim, dengan cepat ditarik kembali setelah memicu kemarahan dari para aktivis media sosial. Di antara fatwa yang dinilai diskriminatif lainnya adalah melarang muslim berdoa memohon belas kasihan bagi non-Muslim setelah mereka mati dan yang lain melarang umat muslim menyapa orang kristen selama perayaan mereka.

“Perlawanan” dari Al-Azhar terhadap undang-undang yang diusulkan bukanlah hal baru atau mengejutkan, Al-Azhar selalu menentang perubahan dan ingin mempertahankan hegemoni atas institusi keagamaan termasuk Dār al-Ifta. Oposisi pemerintah berpendapat bahwa pemerintah menggunakan lembaga-lembaga Islam seperti Dār al-Ifta untuk mendapatkan keuntungan politik lebih lanjut.

Setelah Al-Azhar bukan lagi sebuah universitas yang independen, dan keberadaannya pun di bawah naungan pemerintah Mesir. Penentuan Grand Syaikh dan rektor pun tidak lagi ditentukan oleh ulama-ulama Al-Azhar, tetapi dengan Keppres. Sebagaimana diungkapkan salah seorang dosen filsafat, yang juga tercatat sebagai salah satu anggota “*Majma’ al-Buhūts al-Islāmiyah*”, Prof. Dr Mu’ti Bayumi, lewat koran *Al-Awsat*, 23/4/2010, mengatakan, “Pada dasarnya *Majma’ al-Buhūts al-Islāmiyah*, secara eksistensi tidak mampu menentukan seorang Grand Syaikh Al-Azhar. Dengan demikian, dibutuhkan adanya suatu perubahan dalam anggota tubuh *Majma’ al-Buhūts* itu sendiri agar bisa menentukan seorang Grand Syaikh. Tetapi, karena independensinya telah hilang, maka itu sulit terjadi. Hal ini, mengacu pada Keppres No. 101 tahun 1961, di mana pucuk kepemimpinan Grand Syaikh, rektor, dan dekan-dekan kuliah ditentukan dengan Keppres tersebut. Padahal, Al-Azhar pada masa Kekhalifahan Ustmaniyah, jabatan seorang Grand Syaikh pertama kali ditentukan oleh Al-Azhar itu sendiri. Dan jabatan pertama pun dipangku oleh al-Syaikh Muhammad ‘Abdullah al-Khurāsyi pada 1690. Tetapi dalam perjalanan waktu, Al-Azhar tidak lagi independen.

Begitu pula, ketika Prof. Dr. Muhammad Sayyid al-Thanthāwi meninggal dunia, maka sebagai penggantinya harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pemerintah, atau seorang Presiden. Dengan demikian, jabatan Grand Syaikh jatuh kepada Prof. Dr. Ahmad Muhammad Ahmad al-Thayyib, walaupun keputusan itu menimbulkan kontroversi di sebahagian ulama-ulama Al-Azhar. Namun di masanya pula terbit UU No. 103 tahun 1961 M dari negara di bawah pemerintahan Gamal Abdoul Nashir terkait beberapa amandemen sistem di Al-Azhar, salah satunya adalah menon-fungsikan Dewan Ulama Senior dan digantikan *Majma’ al-Buhūts al-Islāmiyah*. Dengan keputusan ini, penyematan gelar Imam Akbar juga berarti Grand Syaikh memiliki otoritas tunggal dalam menentukan keputusan terkait urusan-urusan agama walau tanpa musyawarah dengan dewan ulama senior. Keputusan tersebut juga berpengaruh pada mekanisme pengangkatan Grand Syaikh dengan otoritas tertinggi presiden yang sebelumnya adalah berdasarkan mufakat *Hai’ah*

Kibār Ulama.² Bagi rezim as-Sisi posisi Ulama Al-Azhar dalam beberapa kasus mungkin dianggap mengganggu, tetapi tidak sampai menjadi ancaman, sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

E. Dialektika Politik antara Ulama Al-Azhar dan Ikhwanul Muslimin

Al-Azhar dan Ikhwan Al-Muslimin (IM) adalah dua institusi penentu proses demokratisasi dan transformasi di Mesir. Tanpa keduanya, tegaknya sistem politik yang menjamin kebebasan, proses pergantian kekuasaan, pengakuan eksistensi kelompok lain akan sulit terwujud. Masyarakat Mesir akan senantiasa berada dalam bayang-bayang penguasa otoriter dan militer tanpa kedua institusi ini (A. A. Hasan, 1995).

Gerakan-gerakan Islam di Mesir dengan beragam bentuknya, baik tradisional maupun modernis juga tak lepas dari pengaruh dua institusi ini. Gerakan Islam tradisional dipengaruhi oleh peran ulama-ulama Al-Azhar, seperti Jamiyah Syariah dan Jamā'ah Anshār Sunnah sementara gerakan-gerakan Islam kontemporer seperti Jamā'ah Islamiyah, Jamā'ah Takfīr wa al-Hijrah, Hizb al-Tahrīr dan Jamā'ah Jihād tak lepas dari pengaruh IM (Rasheed, 2016).

Menurut Muhammad Imārah, salah seorang pemikir kritis Al-Azhar, IM dan Al-Azhar secara manhaj dan pemikiran memiliki kesamaan. Bahkan Imārah menyebutkan bahwa IM adalah orang-orang Al-Azhar yang melakukan pembaharuan dan kelanjutan dari madrasah Muhammad Abduh, pembaharu Al Azhar, di mana Rasyid Ridha guru Hasan Al-Banna (pendiri IM) adalah murid dari Muhammad 'Abduh. Tidak heran jika banyak ulama Al-Azhar yang kemudian bergabung dengan IM, seperti Syaikh Muhammad al-Ghazālī, Syaikh Bahi Khūly, dan Syaikh Yusuf al-Qardhāwi.

Muhammad Imārah menyebutkan jumlah ulama Al Azhar yang berafiliasi ke IM pasca revolusi 2011, mencapai 40.000 orang yang tergabung dalam asosiasi da'i. Al-Azhar mencapai kegemilangan di masa Dinasti Mamalik dan Usmani dan faktor penyebab kegemilangan ini antara lain adalah independensi finansial Al-Azhar, independensi keilmuan Al-Azhar, kedudukan ulama Al-Azhar di tengah masyarakat, dan perhatian rezim penguasa kepada Al-Azhar.

Pasca Revolusi Juli 1952, Al-Azhar berada dalam kontrol rezim penguasa militer, melalui undang-undang reformasi tanah (*land reform law* tahun 1952) penghapusan Mahkamah Syariah tahun 1955, dan nasionalisasi Al-Azhar pada tahun 1961 (Arief Sukino, 2016).

Kontrol rezim secara otomatis mempengaruhi sikap dan pandangan-pandangan Al-Azhar, termasuk ikut menyerang IM melalui Syaikh Al-Azhar. Pasca tumbangnya Husni Mubarak dalam revolusi 25 Januari 2011, IM memenangi pesta demokrasi dengan perolehan 45,2% pada pemilu parlemen dan 51,7% pada pemilihan Presiden Mesir, dengan mencalonkan Muhammad Mursi. Naiknya Mursi menjadi Presiden memunculkan sejumlah ekspektasi, diantaranya, Al-Azhar dan IM akan memasuki fase baru persatuan. Namun dalam perkembangannya, kedua institusi ini terlibat dalam perbedaan politik yang mengarah pada konflik, khususnya dalam kudeta terhadap Presiden Mursi pada 3 Juli 2013. Al-Azhar ikut mendukung kudeta yang dipimpin rezim militer dengan pertimbangan memilih bahaya mudharat yang lebih ringan di antara dua bahaya yang ada (*akhaffu al-dharūrain*).

Konflik yang terjadi antara Al-Azhar dan IM muncul akibat adanya perbedaan

pendapat mengenai jalan keluar atas situasi politik yang terjadi di Mesir. IM yang mengusung Presiden Mursi menganggap kudeta yang dilakukan oleh 'Abdul Fattah al-Sisi sebagai pengkhianatan terhadap legitimasi rakyat Mesir yang telah memilih Presiden Mursi. Di satu sisi Al Azhar ikut mendukung kudeta yang terjadi. Hal inilah yang menjadi pemicu konflik antara Al-Azhar dan IM. Kudeta militer ini menimbulkan banyaknya kerusakan secara material dan korban jiwa. Konflik ini menyebabkan sebuah perubahan dalam masyarakat, seperti dalam komunikasi antar anggota masyarakat yang berbeda kelompok.

Hubungan antara Al-Azhar dan IM mengalami pasang surut dan berujung pada konflik secara tidak langsung pasca lengsernya Mursi dari posisi Keppresidenan terutama karena Al-Azhar menunjukkan dukungannya kepada kudeta militer yang dilakukan oleh al-Sisi.

Perdebatan muncul sejak militer Mesir memberhentikan Muhammad Mursi dari jabatannya sebagai presiden dan mengangkat ketua Mahkamah Konstitusi, Adli Mansur, sebagai presiden sementara. Para pendukung Mursi-Ikhwanul Muslimin dan sayap politiknya, Partai Keadilan dan Pembangunan, serta sejumlah partai dan ormas Islam-menyatakan, pemberhentian Mursi sebagai kudeta militer. Sebab, Mursi merupakan presiden pilihan rakyat Mesir secara demokratis setahun lalu. Selama menjabat presiden, ia tak pernah melanggar konstitusi atau pelanggaran berat lainnya yang bisa dijadikan alasan melengserkannya.

Sebaliknya, para penentang Mursi-kelompok liberal, sekuler, sosialis, dan militer-mengatakan, pencopotan Mursi sebagai pelurusan Revolusi 25 Januari 2011 yang menjatuhkan rezim presiden Hosni Mubarak. Minimal ada dua tuduhan yang mereka kemukakan sebagai alasan penggulingan. Pertama, Mursi dituduh sedang menjadikan Mesir sebagai negara Ikhwanul Muslimin (*Akhunatu Misro*). Atau lebih tepatnya, ia sedang memperjuangkan nilai-nilai Islam pada pemerintahannya. Kedua, pemerintahan Mursi dianggap tidak becus mengurus negara, lantaran ekonomi Mesir terus memburuk selama setahun terakhir ini. Tuduhan-tuduhan yang tentu saja ditolak oleh Mursi dan para pendukungnya. (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/141931769/sejarah-krisis-di-mesir-2011>).

Sikap Grand Syaikh Al-Azhar Mahmūd al-Tayyib kemudian menuai sorotan dan kritik banyak pihak. Meskipun tidak terkait dengan jabatan secara langsung, namun Mahmūd al-Tayyib -dilihat dari perjalanan hidupnya- dinilai sebagian orang tampaknya termasuk yang melihat ke mana angin bertiup. Pada masa rezim Mubarak, Mahmūd al-Tayyib merupakan pendukung setianya. Bahkan, ketika muncul aksi-aksi demonstrasi melawan Mubarak, sikapnya tidak jelas. Baru setelah rezim Mubarak terlihat mulai ada tanda-tanda kejatuhan, ia pun berbelot ke revolusi rakyat yang akhirnya menjatuhkan Mubarak. Malah ia sempat mengeluarkan fatwa, meskipun terlambat, bahwa demonstrasi dan bahkan melawan penguasa tiran dibolehkan alias halal. Karena itu, ia pun mendukung oposisi Suriah menjatuhkan Presiden Bashar al-Assad.

Pada pemerintahan Mursi, Al-Azhar bahu membahu dengan kelompok Islam lainnya, terutama Al-Ikhwan (sebutan Ikhwanul Muslimin), untuk mengamandemen konstitusi negara. Konstitusi baru-yang kemudian disetujui rakyat melalui referendum-ini meletakkan Al-Azhar pada posisi strategis. Yakni, segala undang-undang dan peraturan yang terkait dengan agama harus mendapat persetujuan dari Al-Azhar. Namun, ketika aksi-aksi demo menentang Mursi semakin membesar dan akhirnya didukung militer untuk menjatuhkan Mursi, Syaikh Al-Azhar Mahmūd al-

Tayyib tiba-tiba ikut menentang kekuasaan Mursi yang Islami. Bahkan, ia ikut mendampingi Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal 'Abdul Fattah al-Sisi ketika membacakan pengumuman pemberhentian (baca: kudeta militer) Mursi dari jabatannya sebagai presiden. Mahmūd al-Tayyib duduk berdampingan dengan Uskup Koptik Mesir, Uskup Tawadrus II, dan sejumlah tokoh sekuler-liberal yang menentang kekuasaan Mursi. Alasan yang dikemukakan, mengutip *Al Jazirah.net*, untuk menghindarkan pertumpahan darah sesama rakyat Mesir. Bahkan, Syekh Al-Azhar menyebut demonstrasi yang mendukung dan menentang Presiden Mursi tidak ada kaitannya dengan agama, tapi demi kekuasaan. Menurutnya, alasan mendukung kudeta militer sebagai menghindarkan terjadinya perang saudara.

Sikap dan pernyataan Syaikh Al-Azhar itu segera direspons oleh Ketua Persatuan Ulama Dunia, Syaikh Yusuf Qaradhāwi. "Doktor Tayyib, ketua lembaga ulama-ulama besar Mesir (*roīs kibāruḥ ulama*) telah berbicara atas nama kami. Dia telah bersalah ketika mendukung kudeta militer untuk memberhentikan presiden yang sah dan yang terpilih secara demokratis. Dia telah berseberangan dengan kesepakatan ulama Islam dunia. Karena itu, pendapatnya adalah pribadi dan bukan atas nama para ulama. Pendapatnya yang mendukung kudeta militer untuk menjatuhkan presiden yang sah dan terpilih secara demokratis tidak bersandarkan pada al-Qur'an maupun sunnah sama sekali". (<https://www.republika.co.id/berita/mpy2fu/kisruh-mesir-dalam-pandangan-syekh-alazhar-dan-syekh-qaradhawi>).

Mendapat serangan dari Syaikh Qaradhāwi, Syaikh Al-Azhar tampaknya tidak mau berhadapan dengan koleganya itu. Ia hanya mengatakan akan terus beriktikaf (berdiam diri) di rumahnya sambil terus mendoakan yang terbaik untuk bangsa Mesir. Namun, melalui keterangan pers, Al-Azhar membantah semua pernyataan Syekh Qaradhāwi. Menurutnya, pendapat Qaradhāwi merupakan fitnah dan ia (Qaradhāwi) tidak melihat kenyataan besarnya demo oposisi. Bila hal itu dibiarkan justru akan menimbulkan pertumpahan darah yang tidak perlu," bunyi keterangan pers Al-Azhar sebagaimana dikutip *Al-Ahrām*.

Perlu diketahui Qaradhāwi dan Mahmūd Thayyib sama-sama lulusan Al-Azhar. Qaradhāwi sering disebut sebagai mewakili kelompok Islam politik. Sedangkan, Syaikh Al-Azhar mewakili kelompok Islam kultural. Qaradhāwi yang kini bermukim di Qatar selalu terlibat aktif-baik fisik maupun melalui fatwa-fatwanya-dalam gerakan dan revolusi rakyat melawan penguasa zalim seperti rezim Husni Mubarak dan kini rezim Bashar al-Assad. Qaradhāwi juga merupakan anggota Lembaga Ulama Besar Mesir yang diketuai Syaikh Thayyib. Sebaliknya, Syaikh Thayyib merupakan anggota Persatuan Ulama Dunia yang dipimpin Syekh Qaradhāwi. Baik Syaikh Qaradhāwi maupun Syaikh Al-Azhar masing-masing mempunyai pengikut di berbagai belahan dunia Islam, termasuk di Indonesia. Karena itu, perkembangan di Mesir, termasuk silang pendapat dan perbedaan fatwa antara Syaikh Yusuf al-Qaradhāwi dan Syaikh Al-Azhar terhadap penggulingan pemerintahan Presiden Mursi yang Islami akan sangat menarik diikuti. Perbedaan pandangan Qaradhāwi dengan Mahmūd Thayyib sedikit banyak akan berpengaruh pada perkembangan fikih politik di dunia Islam.

F. Analisis dan Catatan Kritis

Menurut analisa penulis, Setelah Al-Azhar bukan lagi sebuah universitas yang independen, dan keberadaannya sudah dianeksasi pemerintah Mesir, Di mana

penentuan Grand Syaikh dan rektor pun tidak lagi ditentukan oleh ulama-ulama Al-Azhar, tapi dengan Keputusan presiden (Keppres), suara Ulama Al-Azhar seolah-olah dibungkam dan mereka pun kehilangan nalar kritis. Posisi dan bargainingnya kepada pemerintah melemah, dan pada akhirnya mereka cenderung mengikuti kemana arah mata angin rezim. Mengamini kebijakan rezim dan memainkan pola “mencari aman”. Tetapi Meskipun demikian eksistensi Al-Azhar masih tetap diakui dan terbukti masih sesekali melemparkan statement-statement bernada protes kepada rezim yang menyebabkan hubungan antara mereka kadang tidak harmonis.

Hal ini berbeda dengan fatwa Ulama Arab Saudi yang saat ini hanya menjadi instrumen pemerintah untuk menjamin stabilitas kekuasaan Saudi, sehingga konsep Islam yang dipegang oleh ulama Saudi kosong dari makna religiusitasnya dan hanya menjadi senjata politik kerajaan Arab Saudi untuk meneguhkan posisi penguasa dan ulama di Arab Saudi. Fatwa menjadi sesuatu hal yang problematik di internal kerajaan Arab Saudi. Fatwa keluar hanya untuk kepentingan pemerintah dan menjadi alat legitimasi untuk memberangus ulama-ulama yang dianggap kritis dan berseberangan dengan pihak kerajaan. Jared Ritenour (2014) menyebutnya hubungan kerajaan dan ulama sebagai sebuah sistem legitimasi simbiotik (*a system of symbiotic legitimization*) (Hasbi Anwar, 2015).

Pada konteks yang lain sikap tidak tegas Ulama Al-Azhar yang seolah-olah tidak punya inisiatif dan langkah konkret menyelesaikan krisis kemanusiaan di Mesir juga menjadi sorotan banyak pihak. Seperti disampaikan oleh Sa'id Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU dalam salah pernyataannya: “Sangat disayangkan Institusi sekaliber Al-Azhar dengan segudang Ulama yang dia punya tidak mampu berbuat banyak menyelesaikan konflik kemanusiaan di Mesir yang semakin berlarut-larut. Beda di Indonesia, kita punya ormas NU dan Muhammadiyah yang begitu aktif dan responsif menyikapi setiap masalah yang berpotensi melahirkan konflik kemanusiaan.

Dan yang terakhir, dalam diskursus Sunni dan Syiah menurut hemat penulis Ulama Al-Azhar bisa menjadi fasilitator untuk mengakrabkan Sunni dan Syiah dalam banyak hal, melanjutkan gagasan Yusuf al-Qardhāwi salah seorang alumni Al-Azhar melalui gerakan yang diistilahkannya dengan “*Mazhab taqrīb*” melihat peran Syi'ah yang tidak bisa dilepaskan dari berdirinya lembaga Al-Azhar. Grand Syaikh Al-Azhar sekarang Dr. Ahmad al-Thayyib mengemukakan wacana untuk menerima para pelajar dan mahasiswa dari kalangan Syiah belajar dan kuliah di Al-Azhar. Meski usulan itu menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, tetapi menjadi pertanda keinginan menormalisasi hubungan Sunni dan Syiah, demi kehidupan yang harmonis, aman, dan damai.

KESIMPULAN

Peran Ulama khususnya Ulama Al-Azhar di skala regional telah memberikan peranan penting bagi kemajuan peradaban Islam di Mesir itu sendiri. Sebagaimana kita lihat, Al-Azhar dalam sejarahnya telah memberikan sumbangsih pada negara. Al-Azhar merupakan produsen ulama yang sangat tangguh. Mesir merupakan salah satu *center of excellence* dunia Islam. Ulama Mesir banyak mewarnai pergerakan geopolitik Internasional.

Peran penting Al-Azhar di Mesir bagi penguasa Mesir sangat krusial untuk melanggengkan kekuasaannya karena dijadikan sebagai simbol bagi penguatan ideologi penguasa. Al-Azhar menjadi pusat perebutan kekuasaan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi masing-masing penguasa dalam rangka mensukseskan

kepemimpinan mereka.

Akibat dari keterbelakangan umat Islam di Mesir, maka hal itu membawa sebuah sprit untuk modernisasi lembaga Al-Azhar. Setelah mengalami masa kebekuan pemikiran di Al-Azhar Mesir, para pemikir Islam berusaha keras untuk membangkitkan Islam kembali, termasuk di dalamnya gagasan pendidikan. Kebangkitan kembali ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid dan jumud, yang ditengarai akibat dari mundurnya aktivitas ijtihad bahkan pintu ijtihad telah tertutup, membawa kemunduran dunia Islam secara keseluruhan.

Salah satu figur bintang yang menjadi lokomotif reformasi dan moderasi di tubuh Al-Azhar adalah Syaikh Mahmūd Syaltūt. Ulama Al-Azhar ini banyak melakukan perombakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berlaku selama ini di Al-Azhar yang ditengarai menjadi penghambat kemajuan Al-Azhar di era modern.

Dinamika interaksi mewarnai hubungan antara ulama Al-Azhar dan Pemerintah Mesir. Disatu sisi kontribusi ulama al_azhar diperlukan untuk mengokohkan eksistensi rezim tetapi pada sisi yang lain fatwa-fatwanya dianggap membahayakan posisi penguasa dan dapat mengganggu stabilitas negara. Bagi rezim As-Sisi sendiri posisi Ulama Al-Azhar dalam beberapa kasus mungkin dianggap mengganggu, tetapi tidak mengancam. Setelah Al-Azhar dianeksasi oleh Pemerintah Mesir melalui Keppres No. 101 tahun 1961, Al-Azhar perlahan kehilangan independensinya dan tidak lagi mempunyai posisi tawar yang tinggi kepada pemerintah.

Ulama Al-Azhar juga berbeda pandangan politik dengan organisasi terbesar di Mesir yaitu Ikhwanul Muslimin dalam merespon kudeta militer tahun 2013, posisi ulama Al-Azhar cenderung mendukung kudeta tersebut demi pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.

Terpilihnya Mursi menjadi presiden Mesir memunculkan sejumlah ekspektasi, di antaranya bahwa Al-Azhar dan Ikhwanul Muslimin (IM) akan memasuki fase baru persatuan. Namun dalam perkembangannya, kedua institusi ini terlibat dalam perbedaan politik yang mengarah pada konflik, khususnya pada peristiwa kudeta terhadap Presiden Mursi pada tahun 2013. Al-Azhar ikut mendukung kudeta yang dipimpin junta militer dengan pertimbangan memilih bahaya mudharat yang lebih ringan di antara dua bahaya yang ada (*akhaffu al-dharūrain*).

Konflik yang terjadi antara Al-Azhar dan IM muncul akibat adanya perbedaan pendapat mengenai jalan keluar atas situasi politik yang terjadi di Mesir. IM yang mengusung Presiden Mursi menganggap kudeta yang dilakukan oleh Abdul Fattah al-Sisi sebagai pengkhianatan terhadap legitimasi rakyat Mesir yang telah memilih Presiden Mursi. Di satu sisi Al Azhar ikut mendukung kudeta yang terjadi. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik di antara kedua institusi tersebut.

REFERENSI

- Aswar, Hasbi, "Pengaruh Ulama Dalam Politik Di Negara Muslim: Studi Kasus Arab Saudi", *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, Vol.2, No.1, Maret 2015.
- Elfrianto, "Universitas Al-Azhar Kairo Sebuah Refleksi Warisan Islam Dalam Dunia Pendidikan", *Jurnal INTIQAD*, Vol.5, No.1, 1 Juni 2014.
- Feldman, Noah, *The fall and rise of the Islamic state*, (New Jersey: Princeton University Press, 2001).

- Hasan, A. A., *al-Ishlâh al-Siyâsi fi Mihrâb al-Azhâr wa al-Ikhwân al-Muslimîn*, (Kairo: Markaz al-Qâhirah Lidirâsât Huqûq al-Insân, 1995).
- Hatina, Meir, *'Ulama', Politics, and the Public Sphere: An Egyptian Perspective*. (Salt Lake City: The University of Utah Press, 2010).
- <http://www.ntbmесir.net/2019/01/siapa-syekh-mahmud-syaltut.html>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Besar_Al-Azhar.
- <https://news.okezone.com/read/2013/09/19/58/868504/analisa-pernyataan-pbnu-terhadap-krisis-politik-dan-kemanusiaan-di-mesir>.
- <https://republika.co.id/berita/qe079w366/Al-Azhar-mesir-bentrok-dengan-pemerintah-soal-otoritas-fatwa>
- <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2010/05/26/3220/peran-Al-Azhar-dari-dahulu-hingga-sekarang.html>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/141931769/sejarah-krisis-di-mesir-2011>.
- <https://www.republika.co.id/berita/mpy2fu/kisruh-mesir-dalam-pandangan-syekh-alazhar-dan-syekh-qaradhawi>.
- <https://www.republika.co.id/berita/oibo2w313/sejarah-lahirnya-alazhar>
- Jamal, Syauqi 'Atha Allah, *Al-Azhar wa Daurahu as-Siyasi wa al-Hadhori fi Afriqiya*. (Kairo: an-Nahdhah, 1988).
- Muhammad Syafiq Gharbal -*Al-Mawsû'ah al-'Arabiyah al-Muyassarah*, (Kairo: tp, 1965).
- Nata, Abuddin, *Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Rashed, S, *Ifta' al-Masyâikh fi al-Siyâsah. Al-'Araby* [online], Dalam: <https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/2/21>.
- Saputra, Aidil, " Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Fatimiyah di Mesir", *Jurnal BIDADYAH*, Volume 11, No. 2, Desember, 2020.
- Sukino, Arief, "Dinamika Pendidikan Islam di Mesir dan Implikasinya Terhadap Transformasi Keilmuan Ulama Nusantara", *STUDIA DIDAKTIKA Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol.10, No.1, Tahun 2016.
- Thohir, Ajid, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Copyright Holder :

© Abrar et al (2025)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:



